

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sarana komunikasi yang berperan penting menjadi penghubung antara pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) di dalam sebuah perusahaan adalah laporan keuangan. Didalam sebuah perusahaan pihak berkepentingan utama (*stakeholder*) yang dimaksud yaitu antara lain investor, kreditur, karyawan, pemasok, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Laporan keuangan itu sendiri adalah bentuk tanggungjawab perusahaan kepada pihak yang berkepentingan, sehingga laporan keuangan yang dipublikasikan harus sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

Laporan keuangan berfungsi sebagai salah satu sumber informasi yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan. Laporan keuangan berdasarkan IFRS terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan akrual. Informasi dalam laporan keuangan digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan masa depan perusahaan, oleh karena itu informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan harus dibuat dengan benar, disajikan secara jujur

dan relevan, bebas dari rekayasa, tidak terdapat kesalahan material maupun imaterial dan pengungkapan informasi yang ada harus sesuai dengan faktanya. Akan Tetapi pada saat ini masih banyak laporan keuangan yang tidak disajikan secara wajar. Banyak perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dengan integritas yang rendah sehingga menyebabkan masalah dikemudian hari, hal tersebut terjadi baik diperusahaan dalam negeri maupun di luar negeri.

SAK (2004) menyatakan jika laporan keuangan tidak menyesatkan, tidak ada kesalahan material, dan dapat diandalkan sebagai informasi yang jujur dan disajikan secara wajar maka informasi tersebut dikatakan andal. Laporan keuangan atau informasi keuangan dituntut untuk disajikan dengan integritas yang tinggi. Informasi tersebut menunjukkan kondisi suatu perusahaan yang sebenarnya tanpa ada yang ditutupi atau disembunyikan.

Belakangan ini banyak muncul kasus manipulasi terhadap laporan keuangan, salah satu kasus manipulasi tersebut terjadi pada perusahaan sektor *property dan real estate* yaitu yang pertama pada PT. Bakrieland Development (ELTY). Perusahaan ini diketahui mempunyai utang obligasi kepada *Bank of New York*, tetapi tidak dapat melunasi hutangnya yang sudah jatuh tempo, Oleh karena itu perusahaan digugat pailit. Kasus ini pun berdampak sangat buruk bagi kelangsungan usaha PT. Bakrieland Development (ELTY) dikarenakan perusahaan hampir mengalami *delisting* dari Bursa Efek

Indonesia (BEI) serta mengalami krisis kepercayaan dari para investornya di pasar modal. Dalam kasus ini PT. Bakrieland Development mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dilakukan sebagai upaya damai, tetapi yang terjadi PT. Bakrieland Development tidak mengungkapkan masalah tersebut dalam laporan keuangannya.

Kasus yang kedua yaitu pada PT. Sentul City Tbk. Beberapa waktu ini juga tengah menjadi perhatian dan perbincangan serius di masyarakat. Kasus suap yang dialami oleh perusahaan ini terjadi pada tahun 2015 yaitu tentang PT. Bukit Jonggol Asri yang merupakan anak perusahaan dari PT sentul city yang terjerat kasus penyuaipan kepada mantan bupati bogor terkait rekomendasi tukar-menukar kawasan hutan. Lebih buruknya lagi, kasus suap ini mempunyai dampak yang jangka panjang yaitu penurunan laba pada pos pendapatan yang mencapai 25,94% dari tahun sebelumnya (Pasopati, 2015).

Adanya kasus manipulasi yang terjadi didalam laporan keuangan menunjukkan bahwa kegagalan dalam praktik pelaporan keuangan dimasa lalu. Adanya Kasus manipulasi ini merupakan bukti bahwa sektor properti mempunyai risiko yang besar dalam hal pendanaan Kondisi laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan untuk kedepannya akan digunakan oleh investor maupun kreditor sebagai sumber informasi yang dipakai untuk dasar pertimbangan

dalam membuat keputusan yang terkait dengan investasi dana. Oleh karena itu informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus memiliki Integritas yang tinggi sehingga tidak menyesatkan para pengguna laporan keuangan. Disisi lain kepercayaan pasar juga sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha sebuah perusahaan karena walaupun kondisi laporan keuangan dan proyek sehat, tetapi apabila kepercayaan pasar negatif, maka reputasi dan kredibilitas perusahaan juga akan menurun.

Astria (2011) menyatakan banyak perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dengan integritas yang terlalu rendah dan menimbulkan ketidakadilan bagi para pengguna laporan keuangan. Integritas laporan keuangan memiliki kaitan erat dengan salah satu karakteristik yang disyaratkan oleh IFRS, yaitu *faithful representation*. Informasi keuangan berguna dalam pembuatan keputusan jika disajikan secara tulus dan jujur sehingga mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Kerangka konseptual IFRS menjelaskan informasi yang bersifat *faithful representation* harus menyajikan seluruh informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan secara lengkap sehingga tidak menyesatkan para penggunanya (*completeness*). Selain itu, informasi yang bersifat *faithful representation* juga harus memuat substansi *neutrality*. Informasi dikatakan netral apabila bebas dari upaya untuk

mengutamakan kepentingan kelompok tertentu atau memberikan keuntungan kepada pihak tertentu.

Integritas merupakan suatu produk sebagai prinsip moral yang tidak memihak dan jujur dalam menyediakan laporan keuangan yang wajib dipublikasikan dengan benar sebagai sarana pertanggungjawaban pihak manajemen terhadap pengguna laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan yang memiliki integritas melindungi hak-hak *stakeholder*, karena mereka bisa mengetahui keadaan perusahaan yang sebenarnya bukan laporan keuangan yang telah dimanipulasi dan menyesatkan. Laporan keuangan dikatakan memiliki integritas apabila laporan keuangan tersebut memenuhi prinsip dan syarat kualitas laporan keuangan. Yang dimaksud dengan prinsip dan kualitas laporan keuangan itu sendiri adalah laporan keuangan harus bersifat handal, relevan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Kemudian integritas laporan keuangan dapat diukur dengan menggunakan paham konservatisme. Laporan keuangan yang memiliki integritas tinggi dinilai dengan menggunakan prinsip konservatisme. Perusahaan yang mengalami kegagalan akan menutupi masalah dan bertindak *opportunistic*. Juanda (2008) menyatakan bahwa konservatisme merupakan prinsip akuntansi yang jika diterapkan akan menghasilkan angka-angka laba dan aset yang cenderung rendah, serta angka-angka biaya dan hutang cenderung

tinggi. Kecenderungan seperti ini terjadi karena konservatisme menanut prinsip memperlambat pengakuan pendapatan serta mempercepat pengakuan biaya. Akibatnya laba yang dilaporkan cenderung rendah (*understatement*).

Penerapan konservatisme dikarenakan akuntansi menggunakan dasar akrual dalam membentuk dan menyajikan laporan keuangan perusahaan. Savitri (2016) menyatakan bahwa konservatisme masih diterapkan dikarenakan pengguna laporan keuangan masih merasakan keuntungan atau benefit dari pelaporan yang konservatif tersebut. Adanya penerapan konservatisme tersebut akan membatasi dan mengurangi perilaku opportunistik manajer. Kemudian biasanya permasalahan-permasalahan hukum muncul yang pada umumnya menjerat auditor dan perusahaan dikarenakan terjadinya kebangkrutan yang merugikan investor, Hal tersebut terjadi karena adanya *overstatement* dan bukan *undersatement*. Menurut Savitri (2016) disisi lain investor cenderung bersifat *risk averse* sehingga *understatement* lebih dirasa aman dibandingkan *overstatement* yang berisiko lebih menyatkan bagi pengambilan keputusan seorang investor dibandingkan kondisi *understatement*. Bagi perusahaan yang mampu menghasilkan profit maka pengakuan yang asimetris antara *gains* dan *losses* (menunda pengakuan pendapatan dan mempercepat pengakuan beban) akan mengurangi *present value* dari pajak (menunda pembayaran pajak) dan meningkatkan nilai perusahaan. Jadi

setidaknya bagi para pengambil keputusan yang menggunakan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan maka isi dari laporan keuangan yang *understated* dirasa lebih menguntungkan karena mengurangi risiko kerugian yang lebih besar bila laporan keuangan dilaporkan secara *overstatement*. Dengan demikian tampaknya pengguna laporan keuangan lebih nyaman dengan terdapatnya konservatisme di dalam akuntansi.

Investor maupun kreditor selaku pengguna laporan keuangan menggunakan laporan keuangan tersebut sebagai salah satu sumber informasi untuk membuat keputusan dalam hal memberikan kepercayaan kepada perusahaan sektor properti. Terbukti dari beberapa kasus manipulasi data akuntansi yang terjadi pada beberapa perusahaan. Perusahaan menyajikan informasi tanpa memikirkan faktor integritas, dimana informasi yang disampaikan tidak benar dan tidak adil bagi pihak pengguna laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang digunakan tersebut tentunya laporan keuangan setelah adanya proses pengauditan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Kepercayaan pengguna laporan keuangan dan masyarakat atas jasa yang diberikan akuntan publik, mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya.

Kontribusi akuntan publik adalah memberikan pendapat yang independen, menyajikan akuntabilitas, integritas laporan keuangan dan memberi informasi jika laporan keuangan menyajikan hasil yang

wajar dan sudah sesuai dengan kriteria atau aturan yang berlaku. Susiana dan Herawaty (2007) menyatakan posisi akuntan publik adalah sebagai pihak independen yang berperan memberikan opini kewajaran terhadap laporan keuangan sedangkan profesi auditor yang merupakan profesi kepercayaan masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan juga mulai banyak dipertanyakan, apalagi setelah terbukti bahwa semakin meningkatnya tuntutan hukum terhadap kantor akuntan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kantor Akuntan dan Auditor membutuhkan kepercayaan terhadap kualitas jasa audit yang mereka berikan. Jika pemakai laporan merasa Kantor Akuntan Publik memberikan jasa yang sesuai, maka kualitas audit akan meningkat sehingga, Kantor Akuntan Publik dituntut untuk bertindak dengan profesional. Kepercayaan yang besar dari pengguna laporan keuangan audit dan jasa yang diberikan oleh akuntan publik inilah yang mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkan.

Antara kualitas audit dan ukuran Kantor Akuntan Publik terdapat hubungan yang positif diukur dengan reputasi dan kekayaan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kantor Akuntan Publik tersebut. Kantor Akuntan Publik yang besar memiliki insentif yang lebih tinggi untuk mengaudit lebih akurat karena mereka memiliki hubungan erat dengan klien. Klien tersebut akan hilang jika KAP

memberikan laporan yang tidak akurat. Selain itu Kantor Akuntan Publik yang tergolong besar memiliki sumber daya atau kekayaan yang lebih besar daripada Kantor Akuntan Publik yang tergolong kecil. KAP terancam tuntutan hukum oleh pihak ketiga yang lebih besar apabila tidak menghasilkan laporan audit yang tidak akurat (Astria,2011).

Kantor Akuntan Publik 4 besar meliputi *Price Water House* (PWC), *Deloitte Touche Tohmatsu*, *Klynveld Peat Marwick Goerdeler* (KPMG) *International*, dan *Ernst and Young (EY)*. Selain kualitas Audit konsep Good Corporate Governance sangat penting diterapkan oleh perusahaan perusahaan yang memiliki reputasi baik , untuk mempertahankan keberlangsungan usahannya (Pancawati , 2010).

Astria (2011) menyatakan bahwa penyajian laba dalam laporan keuangan tidak menunjukkan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya karena kurangnya integritas laporan keuangan dalam penyajian informasi bagi pengguna laporan keuangan. Terungkapnya skandal-skandal tersebut berakibat pada merosotnya kepercayaan masyarakat, yang ditandai dengan menurunnya harga saham secara signifikan pada perusahaan yang terkena kasus tersebut. Masalah *corporate governance*, ternyata mengakibatkan terungkapnya masalah belum diterapkannya mekanisme *good corporate governance* yang baik oleh beberapa perusahaan.

Konsep Good Corporate Governance yang di terapkan oleh sebuah perusahaan dapat diukur melalui Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional. Kepemilikan manajemen dan kepemilikan institusional merupakan struktur kepemilikan perusahaan yang memiliki fungsi untuk melihat kewajaran sebuah laporan keuangan yang dipublikasikan (Leo, 2012). Persentase total saham pada akhir periode yang dimiliki oleh pihak eksternal perusahaan, disebut kepemilikan institusional (Bukhori, 2012). Sedangkan persentase saham yang dimiliki oleh pihak internal perusahaan adalah kepemilikan manajemen .

Hardianingsih (2010) menunjukkan kepemilikan saham oleh institusi tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan sebuah perusahaan. Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Susiana dan Arleen Herawaty (2007) yang menunjukkan jika kepemilikan saham institusi tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan sebuah perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan konsep yang mengatakan bahwa pihak institusional adalah pemilik yang lebih terfokus pada *currentearnings*. Namun hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Budiarta (2014) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan sebuah perusahaan.

Laporan keuangan adalah bentuk tanggungjawab perusahaan kepada pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan atau informasi keuangan dituntut untuk disajikan dengan integritas yang tinggi. Integritas merupakan suatu produk sebagai prinsip moral yang tidak memihak dan jujur dalam menyediakan laporan keuangan yang wajib dipublikasikan dengan benar sebagai sarana pertanggungjawaban pihak manajemen terhadap pengguna laporan keuangan. Dilihat dari beberapa fenomena yang ada dimana beberapa perusahaan melakukan manipulasi dengan cara menyajikan informasi tanpa memikirkan faktor integritas, dimana informasi yang disampaikan tidak benar dan tidak adil bagi pengguna laporan keuangan. Untuk meminimalisir terjadinya kecurangan maka perusahaan melakukan pengauditan laporan keuangan setiap tahunnya. Proses pengauditan tersebut dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

Kontribusi akuntan public adalah memberikan pendapat yang independen, menyajikan akuntabilitas dan integritas laporan keuangan dan memberi informasi jika laporan keuangan menyajikan hasil yang wajar dan sudah sesuai dengan kriteria atau aturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kantor Akuntan dan Auditor membutuhkan kepercayaan terhadap kualitas jasa audit yang mereka berikan. Kepercayaan yang besar dari pengguna laporan mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkan. Adanya hubungan yang positif antara kualitas audit dan

ukuran Kantor Akuntan Publik diukur dengan reputasi dan kekayaan sumber daya manusia yang dimiliki KAP tersebut. KAP yang besar memiliki insentif yang lebih tinggi untuk mengaudit lebih akurat karena memiliki hubungan yang erat dengan klien. Selain itu mereka juga memiliki kekayaan yang lebih besar daripada KAP yang tergolong kecil .

Kurangnya integritas laporan keuangan dikarenakan penyajian laba dalam laporan keuangan tidak menunjukkan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya. Hal ini secara tidak langsung mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat, yang ditandai dengan menurunnya harga saham secara signifikan pada perusahaan yang terkena kasus tersebut. Masalah corporate governance dikarenakan belum diterapkannya mekanisme good corporate governance yang baik oleh perusahaan. Konsep Good Corporate Governance yang diterapkan oleh sebuah perusahaan dapat diukur melalui kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional merupakan struktur perusahaan yang memiliki fungsi untuk melihat kewajaran sebuah laporan keuangan yang dipublikasikan.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang integritas laporan keuangan sebuah perusahaan dengan judul “
PENGARUH INDEPENDENSI , KUALITAS AUDIT DAN
STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP INTEGRITAS

LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PROPERTY DAN REAL ESTATE “ dengan rentang waktu 2015 – 2017 . Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Mudasetia dan Solikhah (2017) yaitu pengaruh independensi dengan mekanisme GCG dan kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 – 2013. Dalam penelitian tersebut mekanisme GCG diukur dengan persentase kepemilikan saham institusi, persentase kepemilikan saham manajemen, komite audit, komisaris independen. Pada kesempatan ini peneliti menerapkan penelitian tersebut pada perusahaan sub sektor property dan real estate . Peneliti mengambil perusahaan property dan real estate karena perusahaan tersebut memiliki resiko yang sangat besar dalam hal pendanaan. Perusahaan yang bergerak di sektor properti mendapatkan dana dari investor ataupun kreditor. Investor maupun kreditor selaku pengguna laporan keuangan menggunakan laporan keuangan sebagai salah satu sumber informasi untuk membuat keputusan dalam hal memberikan kepercayaan kepada perusahaan sektor properti. Peneliti menghilangkan atau menghapuskan beberapa pengukur Good Governance yaitu jumlah komisaris independen dan komite audit , sehingga peneliti hanya menggunakan dua pengukuran yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Peneliti memilih kedua pengukur tersebut karena peneliti menganggap bahwa

kedua pengukur tersebut memiliki hubungan terhadap integritas laporan keuangan yang di keluarkan oleh perusahaan property terutama dalam hal pendanaan yang dilakukan oleh investor maupun kreditor. Selain itu kedua pengukur tersebut memiliki ketidak konsistenan hasil yang diperoleh dari peneliti peneliti sebelumnya. Dari beberapa penelitian menghasilkan kepemilikan manajemen dan institusional tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan , namun beberapa penelitian juga menghasilkan bahwa kedua pengukur tersebut berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan.

B. Batasan Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel independen yang akan diuji yaitu independensi, kualitas audit, struktur kepemilikan (kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial)
2. Variabel dependen yang akan diuji yaitu integritas laporan keuangan.
3. Sampel dalam penelitian adalah perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2017.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh dari independensi seorang auditor terhadap Integritas Laporan Keuangan perusahaan property dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI periode 2015-2017 ?
2. Bagaimana pengaruh dari kualitas audit terhadap Integritas Laporan Keuangan perusahaan property dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI periode 2015-2017 ?
3. Bagaimana pengaruh dari kepemilikan saham institusional terhadap Integritas Laporan Keuangan perusahaan property dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI periode 2015-2017 ?
4. Bagaimana pengaruh dari kepemilikan saham manajerial terhadap Integritas Laporan Keuangan perusahaan property dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI periode 2015-2017 ?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh Independensi Auditor terhadap Integritas Laporan Keuangan perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2015-2017.
2. Mengetahui pengaruh Kualitas Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2015-2017.
3. Mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Integritas Laporan Keuangan perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2015-2017.

4. Mengetahui pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Integritas Laporan Keuangan perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2015-2017.

E. Manfaat Penelitian

1. Memperoleh bukti mengenai faktor yang mempengaruhi integritas laporan keuangan sebuah perusahaan.
2. Mendukung auditor agar meningkatkan kualitas auditnya, dan menerapkan independensi dan bagi pihak manajemen perusahaan agar meningkatkan penerapan prinsip corporate governance di lingkungan perusahaan terutama dalam proksi Kepemilikan saham institusional dan manajerial.
3. Dapat dijadikan referensi bagi penelitian sejenis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan khususnya dibidang pengauditan.